

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA ALOKASI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI



OLEH

**IRMAL SUANDI
1296141006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
MAKASSAR
2016**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA ALOKASI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana*

OLEH

**IRMAL SUANDI
1296141006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan"

Disusun dan diajukan oleh :

Nama : Irmal Suandi

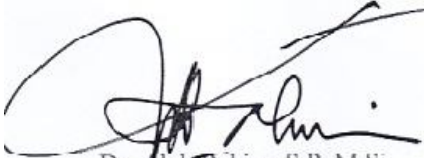
NIM : 1296141006

Prodi : Ekonomi Pembangunan


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diajukan didepan panitia
Ujian Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Makassar, Juni 2016

Pembimbing 1

Acc ya terp

Dr. Abd. Rahim, S.P., M.Si
NIP 19731212 200501 1 001

Pembimbing 2

Acc ya terp
Acc 26/6-2016

Andi Samsir, S.Pd., M.Si
NIP 19840302 201404 1 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan Irmal Suandi dengan Nomor Induk Mahasiswa 1296141006, berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dengan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Nomor untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi ekonomi pembangunan.

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar

Panitia ujian :

1. Ketua : Dr. H. Muhammad Azis, M.Si
2. Wakil Ketua : Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si
3. Sekretaris : Muhammad Imam Maruf, S.P.,M.Sc.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : IRMAL SUANDI
NIM : 1296141006
Tempat/Tanggal Lahir : Jenepono, 28 Agustus 1995
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi
Selatan.

Dosen pembimbing :

1. Dr. Abd. Rahim, S.P., M.Si.
2. Andi Samsir, S.Pd., M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari hasil jiplakan / plagiat.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/luar pengadilan dan menanggung segala resiko yang diakibatkannya.

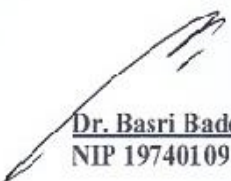
Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juli 2016

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Yang Membuat Pernyataan.


Dr. Basri Bado, S.Pd., M.Si.
NIP 19740109 200501 1 001



Irmal Suandi
1296141016

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan buat susah dirimu, yakinkan dalam hati sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Irmal Suandi)

Hidup harus berlanjut, tak peduli seberapa menyakitkan atau seberapa membahagiakan,
biarkan waktu yang menjadi obat

(Tere Liye)

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah menjadi motivasi dan semangat kepada penulis dan keluargaku tersayang serta sahabat-sahabatku tercinta terima kasih untuk canda tawa dan semangatnya selama ini.

RINGKASAN

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan adanya pemberlakuan desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah karena setiap kepala daerah memiliki kebebasan untuk mengelola segala potensi yang ada di daerahnya. Untuk menunjang hal tersebut maka setiap kepala daerah

harus meningkatkan sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan. Namun setiap daerah mempunyai pendapatan asli yang berbeda maka peranan dana perimbangan sangat diperlukan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sumber penerimaan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dan data diperoleh dari dokumen atau laporan tertulis yang bersumber dari badan pusat statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R^2 , dan juga menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh nilai *Adjusted R*² sebesar 0,488 yang berarti bahwa besarnya persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 48,8% sedangkan sebanyak 51,2% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selain itu, uji lain yang digunakan adalah uji statistik t, dimana diperoleh nilai uji t untuk variabel pendapatan asli daerah yaitu $t_{hitung} = -0,049 < t_{tabel} = 2,001$, nilai uji t untuk variabel dana alokasi umum yaitu $t_{hitung} = 1,893 < t_{tabel} = 2,001$, nilai uji t untuk dana alokasi khusus yaitu $t_{hitung} = 2,317 > t_{tabel} = 2,667$, nilai uji t untuk *dummy* Kota Makassar yaitu $t_{hitung} = 3,542 > t_{tabel} = 2,001$, nilai uji t untuk *dummy* Kota Palopo yaitu $t_{hitung} = 3,509 > t_{tabel} = 2,001$, nilai uji t untuk *dummy* Kota Pare-pare yaitu $t_{hitung} = 2,214 > t_{tabel} = 2,001$, nilai uji t untuk *dummy* Kabupaten Selayar yaitu $t_{hitung} = 1,003 < t_{tabel} = 2,001$, nilai uji t untuk *dummy* Kabupaten Bantaeng yaitu $t_{hitung} = 0,773 < t_{tabel} = 2,001$, Sedangkan uji statistik F diperoleh nilai $F_{hitung} = 8,754 > F_{tabel}$ sebesar 2,172.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar $0,961 > \alpha = 0,05$ serta nilai koefisien sebesar -0,011. Variabel Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0,913 dan signifikan pada nilai 0,063 dengan signifikansi $\alpha = 0,05$. Kemudian variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar $0,024 > 0,05$ serta dengan nilai koefisien yaitu 0,702. Sedangkan untuk *dummy* Kota Makassar memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,01$ serta dengan nilai koefisien yaitu 2,429. *Dummy* Kota Palopo memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,01$ serta dengan nilai koefisien yaitu 1,967. *Dummy* Kota Pare-pare memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

dengan tingkat signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$ serta dengan nilai koefisien yaitu 1,218. *Dummy* Kabupaten Selayar tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar $0,320 > \alpha = 0,05$ serta nilai koefisien sebesar 0,577. *Dummy* Kabupaten Bantaeng tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar $0,443 > \alpha = 0,05$ serta nilai koefisien sebesar 0,467.

SUMMARY

One indicator to see the successful development of a region is economic growth . An economy can be said to experience growth if the level of economic activity increased from one period to the next . With the enactment of the fiscal decentralization is expected to boost economic growth at the regional level for each regional heads have the freedom to manage all the potential that exists in the region . To support this , the head of each region should increase local revenue sources and the balance funds . However, each region has a different revenue equalization funds , the role is indispensable that the general allocation fund and

special allocation funds . Source of revenue is expected to increase the economic growth of a region . Therefore, this study aimed to analyze the influence of local revenue allocation fund general and special allocation funds to economic growth in the province of South Sulawesi . The data used in this research is secondary data that is both time series and data obtained from documents or written reports are sourced from the central body of statistics (BPS). This study used a statistical test is multiple linear regression , t test , F test , and test R^2 , and also using the test the classical assumption of multicollinearity test and autocorrelation test .

From the results of tests performed using SPSS 21 obtained Adjusted R^2 value of 0.488 , which means that the percentage of contribution of independent variables on the dependent variable is 48.8 % while as many as 51.2 % were contributed by other variables not included in the model . In addition , another test used is the test statistic t , where t test values obtained for the variable local revenues ie t count = $-0.049 < t \text{ table} = 2.001$, The value of the variable t test for general allocation funds that t count = $1.893 < t \text{ table} = 2.001$, he value of the t test for the special allocation fund that is t count = $2,317 > t \text{ table} = 2.667$, t test dummy value for the city of Makassar , namely t count = $3,542 > t \text{ table} = 2.001$, t test dummy value for Palopo ie t count = $3.509 > t \text{ table} = 2.001$, t test dummy value for Pare- pare , namely t count = $2,214 > t \text{ table} = 2.001$, t test dummy value for Selayar Regency is t count = $1.003 < t \text{ table} = 2.001$, t test dummy value for Bantaeng ie t count = $0.773 < t \text{ table} = 2.001$, While testing the F statistic obtained value of F count = $8.754 > F_{\text{table}}$ amounted to 2,172 .

These test results show that the original income variable has no influence on economic growth with a significance level of $0.961 > \alpha = 0.05$ and coefficient of -0.011 . Variable General Allocation Fund has no influence on economic growth with coefficient of 0.913 and 0.063 with a value significant at $\alpha = 0.05$ significance . Then the Special Allocation Fund variables have an impact on economic growth with a significance level of $0.024 > 0.05$, and the coefficient is 0.702 . As for the dummy Makassar City has an influence on economic growth with a significance level of $0.001 < 0.01$, and the coefficient is 2.429 . Dummy Palopo have an influence on economic growth with a significance level of $0.001 < 0.01$, and the coefficient is 1.967 . Dummy Pare- pare have an influence on economic growth with a significance level of $0.031 < 0.05$, and the coefficient is 1.218 . Dummy Selayar regency has no influence on economic growth with a significance level of $0.320 > \alpha = 0.05$, and the coefficient value of 0.577 . Dummy Bantaeng have no effect on economic growth with a significance level of $0.443 > \alpha = 0.05$, and the coefficient value of 0,467 .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dengan judul ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”***. Pada penyusunan skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu, serta meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Sudah sepatutnya dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati penulis menghaturkan terimah kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husain Syam selaku rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas negeri Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Azis, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, serta para pembantu dekan yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Basri Bado, S.Pd.,M.Si., selaku ketua program studi Ekonomi Pembangunan sekaligus penguji 1 yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan, kritikan, saran dan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abd. Rahim S.P.,M.Si., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, dan membagi ilmunya dan senantiasa memberikan petunjuk dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Andi Samsir S.Pd.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, dan membagi ilmunya dan senantiasa memberikan petunjuk dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Diah Retno Dwi Hastuti, S.P.,M.Si., selaku penguji II yang telah meluangkan waktu mengikuti seminar-seminar penulis, terima kasih atas kritikan dan sarannya.
7. Bapak/ibu dosen fakultas ekonomi, khususnya Program studi Ekonomi Pembangunan yang telah banyak membimbing penulius dalam proses akademik selama masa perkuliahan.
8. Bapak/ibu Pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa buat yang tersayang dan tercinta Ayahanda Abd. Rajab dan Ibunda Deriwati yang tulus ikhlas memberikan kasih sayang, mencintai, dukungan moral dan materil serta doa yang mengiringi perjalanan hidup penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tuaku, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian orang tuaku.

10. Buat saudaraku Sahrul Ramadhan terima kasih atas dukungannya, meskipun jarak menyulitkan kita untuk dapat berkumpul, namun hati kita selalu bersama terima kasih sudah menjadi adik terhebat sekaligus teman yang baik.
11. Buat sepupuku tercinta Hasnah dan suaminya terima kasih atas dukungan, motivasi serta semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Buat kakanda Ali Hasgar terima kasih banyak atas saran dan masukannya selama ini.
13. Teman-temanku EP A 12 yang selama ini terus bersama-sama dengan penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini. Terimah kasih untuk canda tawa, perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
14. Teman KKN posko Desa Buntu Batuan, Dimas, Risma, Puji, Anggi, Marwati dan Bukhria terimakasih atas kekeluargaanya selama ini, terima kasih buat semangat, canda tawa dan kenangan-kenangan manisnya.
15. Buat temanku Satriani, Rahimah, Hasruddin, Nur Ardi Tahir dan semuanya yang tak mungkin penulis bisa tulis satu persatu, terima kasih atas bantuan semangatnya selama ini, terima kasih sudah mau mendengarkan semua keluhan kesahku selama ini, kalian memang yang terbaik.
16. Penulis tidak dapat menulis seluruh nama di lembaran ini, namun penulis telah mengukir nama kalian di dalam hati, yang telah hadir di hidup penulis baik itu dalam hal penyusunan skripsi, perkuliahan, dan lingkungan di sekeliling penulis. Kisah kalian takkan terlupakan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Makasar, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v

RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	8
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	17
2.4 Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	20
3.2 Variabel dan Desain Penelitian	20
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	24

3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Rancangan Analisis Data	26
3.6.1 Uji Statistik	26
3.6.2 Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas dan Autokorelasi)...	30

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Wilayah Kota Makassar	34
4.2 Gambaran Wilayah Kota Pare-Pare	35
4.3 Gambaran Wilayah Kota Palopo	36
4.4 Gambaran Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	37
4.5 Gambaran Wilayah Kabupaten Bantaeng	38
4.6 Gambaran Wilayah Kabupaten Pangkep	39

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	41
5.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	41
5.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	43
5.1.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Selatan	45
5.1.4 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan	48

5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	50
5.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	57
5.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	57
5.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	58
5.2.4 Perbedaan Wilayah	59
 BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013	2
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013	4

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2014	35
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kota Pare-Pare Menurut Kecamatan Tahun 2014	36
Tabel 4.3	Luas Wilayah Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2014	37
Tabel 4.4	Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kecamatan Tahun 2014	38
Tabel 4.5	Luas Wilayah Kabupaten Bantaeng Menurut Kecamatan Tahun 2014.....	39
Tabel 4.6	Luas Wilayah Kabupaten Pangkep Menurut Kecamatan Tahun 2014	40
Tabel 5.1	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2013	42
Tabel 5.2	Hasil Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	19
Gambar 3.1 Desain Penelitian	23

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 5.1 Trend Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	44
Grafik 5.2 Trend Penerimaan Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Selatan	46

Grafik 5.3	Trend Penerimaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan	48
------------	----------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator penting untuk mengamati hasil-hasil pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan

untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. Selain itu, indikator ini sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sampai sejauh mana aktifitas perekonomian selama periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Menurut Gustiana (2014) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan melihat produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	44.549,82	7,78
2009	47.314,02	6,20
2010	51.255,54	8,19
2011	55.093,74	7.61
2012	59.718,50	8,39

2013	64.284,43	7,65
Rata-rata	53.702,68	7,63

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah (2015)

Dari tabel diatas dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2009 yang mengalami pluktuatif, dimana yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,39% atau meningkat 0,78% dari tahun sebelumnya, sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20%

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, setiap Daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja, akan tetapi juga bersumber dari pendapatan Daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut penelitian Gustiana (2014) Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan dibidang industri atau memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih

besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Pemerintah pusat akan menstransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian Daerah dari Hasil Pajak Pusat. (Windha:2013).

Menurut Halim dalam Gustiana (2014) DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Kebijakan Dana Alokasi Umum merupakan Instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antar daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah. Selain itu DAK juga berasal; dari APBN dan dialokasikan ke

kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. (Suparmoko,2002)

PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 (Ribu Rupiah)

	Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Dana Alokasi Umum (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2008	690.064.341	7.451.080.245	1.183.405.017	7,78
2009	760.601.054	7.616.283.096	1.271.360.200	6,20
2010	784.776.085	8.094.857.806	1.227.921.300	8,19
2011	1.065.337.158	9.044.437.839	1.228.019.900	7.61
2012	1.382.007.540	11.036.725.994	1.185.158.664	8,39
2013	1.630.923.839	12.665.297.745	1.392.817.478	7,65

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah (2015)

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana *trend* penerimaan dari tahun 2008-2013. dimana pada tahun 2008-2009 terjadi peningkatan penerimaan pemerintah, namun dalam periode yang sama pertumbuhan ekonomi mengalami pluktuasi, dimana pada tahun 2009 mengalami pelambatan dibandingkan dengan tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan 6,2 % begitupun pada tahun 2011 mengalami pelambatan jika dibandingkan dengan tahun 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan *dummy* perbandingan wilayah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan *dummy* perbandingan wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan, terutama Pemerintah Daerah didalam mengelola Daerahnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Permanasari (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian Gustiana (2011) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Penelitian Setyawati (2007) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil Penelitian Wandira (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil Penelitian Permana (2013) menunjukkan secara Parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan Isa (2010) menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian Arifintar (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi, kemudian Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2013) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Anggraeni (2012) pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu, proses, output perkapita, dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern peekonomian (*self generating*).

Menurut Nanga dalam wahyuni (2013) memberikan pengertian pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan dalam kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi lebih

menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data *Gross National Product* (GNP).

Gross National Product adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun (Wahyuni,2013).

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi/tahun} = \frac{GNP_t - GNP_{t-1}}{GNP_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

$Tahun_t$ = Tahun yang dihitung pertumbuhannya

GNP_t = *Gross National Proudct* tahun t

GNP_{t-1} = *Gross National Product* tahun sebelumnya

Perumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai akhir pasar dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Menurut Gustiana (2014) Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Proses pertumbuhan dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung tergantung pada faktor ekonominya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal usaha teknologi dan sebagainya. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. (Jhingan, 2013)

2.2.1.1 Teori Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki oleh investasi. Pertama, investasi dapat menciptakan pendapatan yang biasanya dikenal dengan dampak permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang biasanya dikenal dengan dampak pengeluaran. Oleh karena itu, selama investasi tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output senantiasa akan membesar. (Jhingan, 2013)

Berikut ini adalah model yang digunakan oleh Harrod dan Domar untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat menciptakan pertumbuhan :

1) Model Domar

Domar membangun modelnya dengan asumsi investasi disatu pihak menghasilkan pendapatan dan pihak lain menaikkan kapasitas produktif, dimana kenaikan kapasitas produksi dapat dijelaskan dari sisi penawaran. Misalnya laju investasi adalah I , dan kapasitas produksi tahunan per dolar modal baru yang ditanam rata-rata sama dengan s (yang menggambarkan rasio kenaikan pendapatan nyata atau *output marginal*), sehingga kapasitas produktif dolar I yang diinvestasikan adalah $I \cdot s$ dolar pertahun.

Tetapi sebagian investasi baru akan mengorbankan investasi lama, maka dari itu investasi baru akan bersaing dengan investasi lama di pasar tenaga buruh dan faktor-faktor produksi lain. Karena adanya persaingan ini maka *output* pabrik lama akan akan berkurang dan kenaikan *output* tahunan (kapasitas produksi) dari perekonomian akan sedikit lebih kecil dari pada $I \cdot s$. Sehingga ini dapat dinyatakan $I\sigma$, dimana σ (sigma) menggambarkan potensi netto produktivitas rata-rata sosial investasi ($=\Delta Y/I$). Sehingga $I\sigma$ lebih kecil dari $I \cdot s$. Dimana $I\sigma$ merupakan jumlah netto potensi kenaikan *output* perekonomian tersebut. Hal inilah yang oleh Domar disebut dengan kenaikan *output* yang dapat dihasilkan oleh perekonomian dari sisi penawaran. (Jhingan, 2013)

Sedangkan kenaikan yang diperlukan dalam permintaan *agregat* digambarkan oleh Domar dengan pengali (multiplier) Keynesian. Misalkan kenaikan rata-rata dinyatakan dengan ΔY dan kenaikan dalam investasi dengan ΔI dan kecenderungan menabung dengan α ($=\Delta S/\Delta Y$). Maka kenaikan pendapatan itu akan sama dengan multiplikator $(1/\alpha)$ kali kenaikan dalam investasi, sehingga :

$$\Delta Y = \Delta I \frac{1}{\alpha}$$

2) Model Harrod

Model Harrod didasarkan pada 3 macam laju pertumbuhan, yaitu pertama, laju pertumbuhan aktual (G), yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modal-*output*, dimana laju ini menunjukkan variasi siklus jangka pendek dalam laju pertumbuhan. Kedua, laju pertumbuhan terjamin (G_w), yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian. Ketiga, laju pertumbuhan alamiah (G_n), ini dianggap sebagai optimum kesejahteraan atau biasa juga disebut dengan laju pertumbuhan potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh.

Model Harrod untuk laju pertumbuhan aktual (G), yaitu $GC = S$, dimana G merupakan laju pertumbuhan *output* dalam periode waktu tertentu yang dapat dinyatakan sebagai $\Delta Y/Y$, C adalah tambahan netto terhadap modal yang didefinisikan sebagai rasio investasi terhadap kenaikan pendapatan, yaitu $I/\Delta Y$, dan S merupakan kecenderungan menabung rata-rata yaitu S/Y . Sehingga dengan rasio tersebut maka diperoleh $I = S$ artinya tabungan sama dengan investasi, dimana hubungan ini dapat terjadi dengan syarat S tergantung Y , I tergantung pada tambahan pendapatan (ΔY), yang biasanya digunakan sebagai prinsip percepatan.

Laju pertumbuhan terjamin terjadi karena produsen merasa puas atas apa yang mereka kerjakan sehingga disebut juga sebagai ekuilibrium usaha atau permintaan dianggap cukup tinggi oleh para pengusaha untuk menjual apa yang sudah diproduksi dan mereka akan terus memproduksi dengan laju pertumbuhan

yang sama sehingga penawaran dan permintaan akan tetap berada pada ekuilibrium. Dimana persamaanya adalah : $G_w = C_r = s$

Dimana G_w merupakan laju pertumbuhan terjamin atau laju pertumbuhan pendapatan dalam kapasitas penuh yang akan sepenuhnya memanfaatkan stok modal yang sedang membengkak sehingga dapat memuaskan para pengusaha atas jumlah investasi yang mereka tanam ($G_w = \text{nilai } \Delta Y/Y$), dan C_r merupakan modal yang dibutuhkan, menunjukkan jumlah modal (rasio modal *output*).

2.2.1.2 Teori Pertumbuhan Agregat

Glasson (Dalam Lucky, 2011) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis dalam jangka pendek yang diasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga, teknologi, dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya banyak ahli yang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen atau eksogen, yaitu faktor-faktor yang berasal dari daerah bersangkutan maupun faktor-faktor yang berasal dari luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penting yang menjadi penentu dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Sedangkan salah satu faktor penentu yang berasal dari luar daerah adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah penggunaan model ekonomi makro. Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan *output* regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa dengan cara sendiri-sendiri (Glasson,1997) dan dapat dituliskan sebagai berikut :

$$O_n = F_n (K, L, Q, Tr, T, So)$$

Keterangan :

O_n = *Output* potensial dari daerah n

K = Modal (Kapital)

L = Tenaga Kerja

Q = Tanah

Tr = Sumber daya pengangkutan

T = Teknologi

So = Sistem sosial politik

Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus mengenai persamaan pertumbuhan sebagai berikut:

$$O_n = a_n k_n + (1-a_n) l_n + t_n$$

Keterangan :

O, k, l, t = Tingkat pertumbuhan *output*, modal tenaga kerja dan teknologi

a = Bagian pendapatan yang diperoleh modal (yakni produk marginal dari modal)

2.2.1.3 Teori pertumbuhan baru

Menurut Romer (dalam Lucky, 2011) Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut juga modal manusia.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan model sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tetapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen peran investasi dalam model fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. (Mankiw dalam Lucky 2011)

Berdasarkan ketiga teori pertumbuhan yang dijelaskan diatas, dimana dapat disimpulkan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika faktor produksi ini meningkat maka kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat.

Faktor produksi yang dimaksud didalam ketiga teori tersebut adalah tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi, didalam teori pertumbuhan ekonomi biasanya sangat erat berhubungan dengan kegiatan investasi, dimana investasi disini memiliki dua makna yaitu pertama, investasi dapat menciptakan pendapatan yang biasanya dikenal dengan dampak permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang biasanya dikenal dengan dampak pengeluaran. (Lucky, 2011)

Dengan adanya teori pertumbuhan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, dimana salah satu faktor produksi itu adalah akumulasi modal, maka di didalam era desentralisasi fiskal maka setiap penerimaan daerah dapat dijadikan sebagai modal oleh daerah untuk melakukan kegiatan pengeluaran sehingga nantinya dapat menciptakan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penerimaan daerah yang dapat dijadikan modal dalam era desentralisasi maka hal ini sesuai dengan beberapa teori pertumbuhan yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan daerah ini merupakan salah satu faktor produksi yang dimiliki daerah untuk menciptakan *output* maupun investasi, sehingga dengan adanya *output* dan investasi ini nanti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

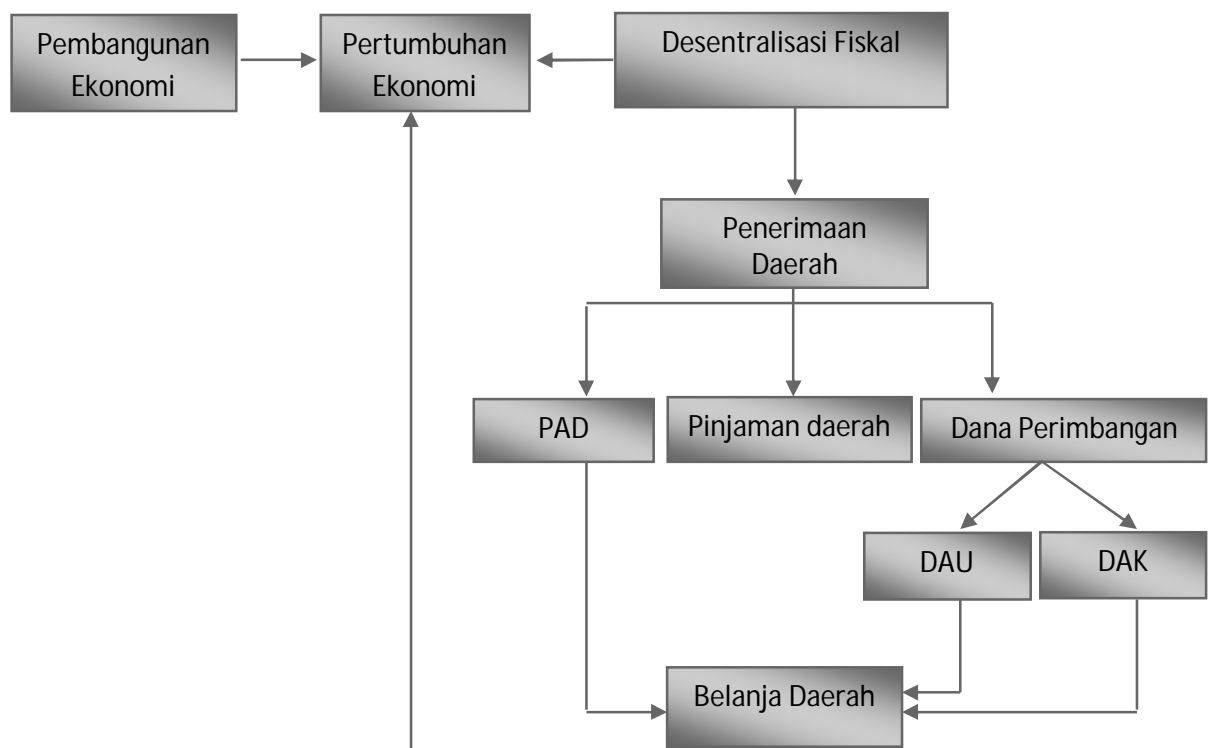
2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Salah satu indikator untuk melihat pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin bertambah besar pada tahun berikutnya. Dengan kata lain produktifitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi semakin besar dan dampaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pemberlakuan desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah karena setiap kepala Daerah diberikan kebebasan penuh untuk mengatur dan mengelola segala sumber daya yang ada didalam daerahnya. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan. Setiap daerah mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda, artinya tingkat pendapatan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama, untuk itu diperlukan dana perimbangan sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah pendapatan yang dihasilkan. Adapun dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak, namun dalam penelitian ini hanya ingin mengambil dua jenis dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka penerimaan ini harus dialokasikan kedalam belanja daerah, sehingga apabila pengalokasian ini sudah tepat maka bisa berdampak kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka pikir, maka peneliti mengajukan hipotesis diduga bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan *dummy* perbandingan wilayah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berdasarkan dimensi waktu, atau data *time series* (runtut waktu) dengan menganalisis data yang

termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2003-2013.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

3.2 Variabel dan Desain Penelitian

3.2.1. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian yaitu variabel independen atau variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau variabel terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y.

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan *dummy* perbandingan wilayah (X_4)

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengganda variabel lain. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

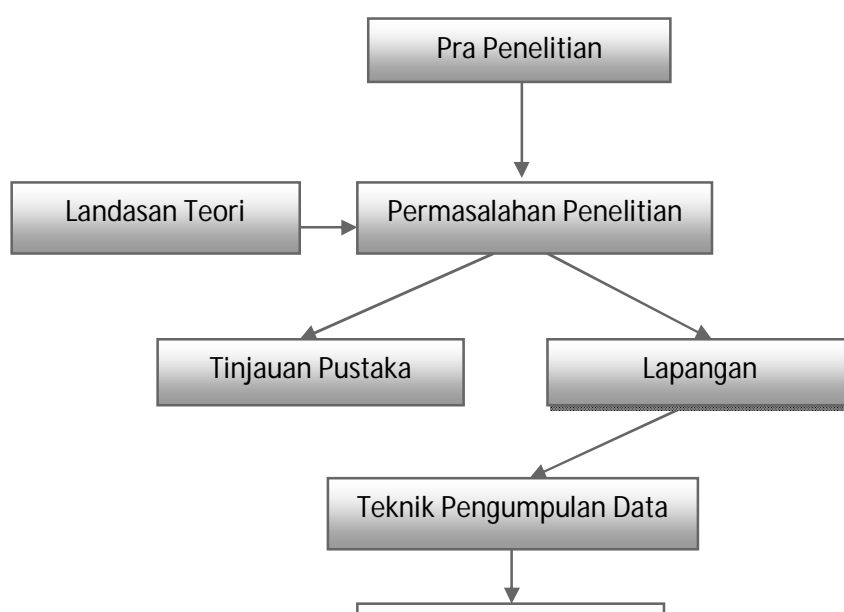
3.2.2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rancangan percobaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan .

Didalam desain penelitian dapat memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian konklusif yang merupakan penelitian deskriptif yaitu penyusunan tabel-tabel dalam bentuk pemaparan kontekstual terhadap masalah yang dianalisis yaitu bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan *dummy* perbandingan wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Didalam melaksanakan penelitian, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh betul-betul relevan dan akurat. Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka diperlukan teknik pengumpulan data yang baik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tinjauan pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel yang terkait, serta mengakses *website* atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran skema/desain penelitian berikut ini:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Pengambilan sampel berdasarkan variabel-variabel

yang digunakan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus selama periode 2004-2013. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Dasar pertimbangan penulis memilih metode ini karena didalam pengumpulan sampel, penulis menetapkan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria penarikan sampel dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 5 tahun terakhir.

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan definisi operasional sebagai berikut:

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya, dalam hal ini diukur dengan satuan Persen.

b. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah PAD yang diterima / diperoleh daerah Provinsi Sulawesi Selatan pertahunnya selama periode tahun 2003-2013 dalam satuan Rupiah.

c. **Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum adalah DAU yang diterima / diperoleh daerah Provinsi Sulawesi Selatan pertahunnya selama periode 2003-2013 dalam satuan Rupiah.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah DAK yang diterima / diperoleh daerah Provinsi Sulawesi Selatan pertahunnya selama periode 2003-2013 dalam satuan rupiah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen atau laporan tertulis lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan literatur yang terkait.

3.6 Rancangan Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik

a. Model Regresi Berganda

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipangkatkan serta

menggunakan persamaan *Multiple Regression* dengan metode panel data (*fixed effect*) sebagai berikut :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \delta_1 DmMks_i + \delta_2 DmPlp_i + \delta_3 DmPre_i + \delta_4 DmSlyr_i + \delta_5 DmBtg_i + \mu^{1it} \dots\dots\dots(III.1)$$

Untuk memudahkan perhitungan model persamaan (III.1) maka persamaan tersebut diubah menjadi linear berganda dengan metode *Semi-log*, metode ini dipilih karena data yang ditransformasi hanya salah satu variabel dari variabel bebas atau variabel terikat, adapun dalam penelitian ini menggunakan metode *Semi-log* dengan model *lin-log* yaitu suatu model dimana variabel bebas ditransformasikan kedalam bentuk linear sedangkan variabel terikat tetap berbentuk logaritma. Adapun persamaannya sebagai berikut :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + \delta_1 DmMks_i + \delta_2 DmPlp_i + \delta_3 DmPre_i + \delta_4 DmSlyr_i + \delta_5 DmBtg_i + \mu^{1it} \dots\dots\dots(III.2)$$

Keterangan :

- PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)
- β_0 = *Intercep*/konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi variabel bebas
- $\delta_1 \dots \delta_5$ = Koefisien variabel *dummy*
- DAU = Dana Alokasi Umum (Rp)

DAK = Dana Alokasi Khusus (Rp)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Rp)

Dummy perbedaan wilayah

DmMks = 1, untuk wilayah Kota Makassar
0, untuk lainnya.

DmPlp = 1, Untuk wilayah Kota Palopo
0, untuk lainnya.

DmPre = 1, Untuk wilayah Kota Pare-pare
0, Untuk lainnya.

DmSlyr = 1, Untuk wilayah Kabupaten Selayar
0, Untuk lainnya.

DmBtg = 1, Untuk wilayah Kabupaten Bantaeng
0, Untuk lainnya.

μ = Kesalahan Pengganggu (*disturbance error*)

i = *cross section*

t = *time series*

Alasan memilih wilayah tersebut adalah diantara 24 Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, daerah ini yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir.

b. Uji F dan Uji t

Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara bersama-sama digunakan uji F dengan tingkat kepercayaan tertentu, menurut (Rahim, 2012) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$F_{hit} = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} \dots \dots \dots (III.3)$$

$$F \text{ tabel} = (k - 1): (n - k): \alpha$$

Keterangan :

α = tingkat signifikan atau kesalahan tertentu

Selanjutnya pengujian terhadap koefisien regresi secara individu (parsial) digunakan uji t dengan tingkat kepercayaan tertentu. Menurut (Rahim,2012) dengan rumus :

$$t \text{ hit} = \frac{\beta_i}{s\beta_i} \dots\dots\dots(III.4)$$

Keterangan :

β_i = Koefisien Regresi ke-i

$s\beta_i$ = Kesalahan standar koefisien regresi ke-i

c. Ketepatan Model (R^2)

Ketepatan atau kesesuaian modal (*goognes of fit*) dilakukan dihitung melalui R^2 dan *Adjusted* R^2 . Pada R^2 diartikan besarnya persentase sumbangan variabel bebas (X) terhadap variasi (Naik-turunnya) variabel tidak bebas (Y), sedangkan lainnya merupakan sumbangan dari faktor lainnya yang tidak masuk dalam model, atau menurut (Rahim, 2012) untuk mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh X dalam model regresi. Menurut (Rahim,2012) dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{E_{ss}}{TSS} \dots\dots\dots(III.5)$$

Atau

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} \dots\dots\dots(III.6)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

ESS = *Explained sum of Square* (Jumlah kuadrat yang dapat dijelaskan)
 $= \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2$

TSS = *Total sum of Square* (Total jumlah kuadrat) $= \sum (Y - \bar{Y})^2$

RSS = *Residual sum of Square* (Residual jumlah kuadrat yang tidak dapat dijelaskan) $= \sum (\bar{Y} - \hat{Y})^2$

Nilai R^2 selalu meningkat dengan bertambahnya variabel bebas dari suatu model, hal tersebut menjadi kelemahan R^2 . Selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut dipergunakan yang R^2 disesuaikan (*Adjusted R^2*) sehingga dapat menghindari terjadinya bias terhadap variabel independen yang dimasukkan dalam model. Menurut (Rahim, 2012) dirumuskan sebagai berikut :

$$Adjusted R^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{(n-1)}{(k-1)} \dots\dots\dots(III.7)$$

Keterangan :

Adjusted R^2 = Koefisien determinasi yang disesuaikan

k = jumlah variabel tidak termasuk intercep

n = Jumlah sampel

3.6.2 Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas dan Autokorelasi)

Pengujian multikolineritas digunakan pada tujuan penelitian pertama dan kedua. (Rahim, 2012) mengemukakan bahwa multikolinearitas (*multicollinearity*)

atau kolinearitas ganda merupakan kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model.

Menurut (Rahim, 2012) penyimpangan asumsi klasik dapat dideteksi dengan berbagai cara melihat hasil koefisien korelasi antar variabel (Rahim, 2012). Cara lain dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF), *tolerance* (TOL) serta dengan *eigenvalues* dan *conditional index* (CI).

Penelitian ini menggunakan VIF yang terdapat pada Program *Statistical Program for Service Solution* (SPSS) versi 21. Menurut Rahim (2012), dirumuskan sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{1-R_j^2} \dots\dots\dots(III.8)$$

R_j^2 diperoleh dari regresi *auxiliary* antara variabel independen atau koefisien determinasi antara variabel bebas ke- j dengan variabel bebas lainnya, selanjutnya jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas (Rahim, 2012).

Tindakan perbaikan multikolinearitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi tetapi perlu memperhitungkan bias spesifikasi dalam model (Rahim, 2012). Cara lain menambah jumlah sampel, transformasi dalam bentuk Ln dan menambah variabel *dummy*.

Adanya multikolinearitas estimator masih tetap *BLUE* sehingga dapat pula dilakukan tanpa adanya perbaikan karena estimator *BLUE* sehingga tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel bebas (Rahim, 2012).

Menurut Rahim (2012) Asumsi dari sifat estimator *BLUE*, yaitu varian dari variabel gangguan tetap konstan (homokedastisitas) dan tidak adanya korelasi atau hubungan antara variabel gangguan satu observasi lainnya yang disebut non-autokorelasi.

Pada penelitian ini menggunakan pengujian autokorelasi. Autokorelasi (*autocorrelation*) atau serial korelasi merupakan korelasi antara variabel sampel satu dengan sampel lainnya μ_t atau μ_{t-1} (Rahim,2012) atau kesalahan random observasi lainnya pada anggota sampel yang diurutkan menurut runtun waktu (*time series*) dengan persamaan sebagai berikut :

$$\mu_t = \rho\mu_{t-1} + V_t \dots\dots\dots(III.9)$$

Adanya autokorelasi menyebabkan estimator dari persamaan regresi tidak efisien dan tidak konsisten walaupun *Unbiased* (Rahim, 2012). Selanjutnya menurut (Rahim, 2012) penyimpangan asumsi klasik jika non-autokorelasi dilambangkan sebagai berikut :

$$E (U_i, U_j) = 0 \dots\dots\dots(III.10)$$

Sedangkan adanya autokorelasi dilambangkan

$$E (U_i, U_j) \neq 0 \dots\dots\dots(III.11)$$

Dengan hipotesis :

$H_0 : \rho = 0$, artinya non-autokorelasi

$H_1 : \rho \neq 0$, artinya terdapat autokorelasi (Rahim,2012)

Pada penelitian ini melalui pengujian Durbin-Watson (DW) dengan program SPSS versi 21. Dalam melakukan uji DW digunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

μ_t = Gangguan Stokastik ke_t

μ_{t-1} = Gangguan Stokastik ke_{t-1}

Jika $DW > d_L$, maka tidak ada autokorelasi; jika $DW < d_L$, maka ada autokorelasi positif jika $DW > 4 - d_L$, maka ada autokorelasi negatif; jika $d_L < DW < d_u$, maka tidak dapat disimpulkan/ragu-ragu/tidak meyakinkan. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Kemudian masalah autokorelasi dapat pula terjadi jika R^2 lebih besar dari nilai DW. Akan tetapi jika dalam pengujian masih terdapat keragu-raguan maka digunakan uji lain yaitu dengan metode *Breusch-Godfrey* (B-GTest)

Breusch-Godfrey (B-GTest) digunakan untuk menguji adanya masalah autokorelasi dengan tingkat tinggi. Autokorelasi dapat dideteksi dengan membandingkan X^2 hitung dengan X^2 tabel dengan $df=(\alpha,p)$. Jika nilai X^2 hitung $> X^2$ tabel menunjukkan adanya masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika X^2 hitung $< X^2$ tabel menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Wilayah Kota Makassar

Kondisi geografis Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Timur : Kabupaten Maros
- Sebelah selatan : Kabupaten Gowa

- Sebelah Barat : Selat Makassar

Dari segi kependudukan, kota Makassar pada tahun 2014 jumlah penduduknya mencapai 1.408.071 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 695.955 jiwa dan perempuan sebanyak 712.117 jiwa, yang tersebar di 14 kecamatan dan 143 kelurahan.

Kecamatan terluas di Kota Makassar adalah kecamatan Biringkanaya yaitu dengan luas wilayah 48,22 km² dan Kecamatan tersempit adalah Kecamatan Mariso dengan luas wilayah 1,82 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakkukang	17,05	9,70

12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	49,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,12
Jumlah		175,77	100,00

Sumber : BPS Sulsel, Makassar dalam Angka 2014

4.2 Gambaran Wilayah Kota Pare-pare

Kondisi geografis Kota Pare-pare terletak antara 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Dari segi kependudukan, Kota Pare-pare pada tahun 2014 jumlah penduduknya mencapai 135.200 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 66.274 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 68.926 jiwa yang tersebar di 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

Kecamatan terluas di Kota Pare-pare adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas wilayah yaitu 66,70 km² dan Kecamatan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Kecamatan Soreang dengan luas 8,33 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kota Pare-pare Menurut Kecamatan Tahun 2014.

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
-----	-----------	-------------------------	----------------

1	Bacukiki	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	13,00	13,08
3	Ujung	11,30	11,37
4	Soreang	8,33	8,38
Jumlah		99,33	100,00

Sumber : BPS Sul-Sel, Pare-pare dalam Angka 2014

4.3 Gambaran Wilayah Kota Palopo

Kondisi geografis Kota Palopo terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Walenreng Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bua
- Sebelah Barat : Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara

Dari segi kependudukan, Kota Palopo pada tahun 2014 jumlah penduduknya mencapai 160.819 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 78.494 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 82.325 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan dan 27 kelurahan.

Kecamatan yang terluas dari Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas wilayah 54,13 km² dan Kecamatan tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas wilayah 10,58 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Luas Wilayah Kota Palopo Menurut Kecamatan tahun 2014

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Wara Selatan	10,66	4,30

2	Sendana	37,09	14,98
3	Wara	11,49	4,64
4	Wara Timur	12,08	4,88
5	Mungkajang	53,80	21,74
6	Wara Utara	10,58	4,27
7	Bara	17,75	7,17
8	Telluwanua	34,34	13,87
9	Wara Barat	54,13	21,86
Jumlah		247,52	100,00

Sumber : BPS Sul-Sel, Palopo dalam Angka 2014

4.4 Gambaran Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Timur : Laut Flores
- Sebelah Barat : Laut Flores dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Propinsi Nusa Tenggara Timur

Dari segi kependudukan, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2014 berjumlah 128.744 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 61.813 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 66.931 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan.

Kecamatan yang terluas dari Kabupaten kepulauan selayar adalah Kecamatan Bontomatene dengan luas wilayah 203,65 km² dan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Benteng dengan luas wilayah 7,12 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kecamatan tahun 2014.

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)
1	Pasimarannu	182,48	14,52
2	Pasilambena	104,25	8,29
3	Pasimasunggu	117,86	9,38
4	Taka Bonerate	27,89	2,21
5	Pasimasunggu Timur	56,97	4,53
6	Bontosikuyu	196,74	15,65
7	Bontoharu	129,75	10,32
8	Benteng	7,12	0,56
9	Bontomanai	161,57	12,85
10	Buki	68,13	5,42
11	Bontomatene	203,65	16,20
Jumlah		1256,41	100,00

Sumber : BPS Sul-Sel, Kepulauan Selayar dalam Angka 2014

4.5 Gambaran Wilayah Kabupaten Bantaeng

Kondisi geografis Kabupaten Bantaeng terletak antara 5°21'13"-5°35'26"

Lintang Selatan dan 119°51'42" - 120°05'27" Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto
- Sebelah Selatan : Laut Flores

Dari segi kependudukan, Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 berjumlah 182.283 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 88.012 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 94.271 jiwa yang tersebar di 8 Kecamatan dan 21 Kelurahan.

Kecamatan yang terluas dari Kabupaten Bantaeng adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas wilayah 76,99 km² dan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Luas Wilayah Kabupaten Bantaeng Menurut Kecamatan tahun 2014.

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Bissappu	32,84	8,30
2	Uluere	67,29	17,00
3	Sinoa	43	10,86
4	Bantaeng	28,85	7,29
5	Eremerasa	45,01	11,37
6	Tompobulu	76,99	19,45
7	Pajukukang	48,9	12,35
8	Gantarangkeke	52,95	13,38
Jumlah		395,83	10.00

Sumber : BPS Sul-Sel, Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2014

4.6 Gambaran Wilayah Kabupaten Pangkep

Kondisi geografis Kabupaten Pangkep terletak diantara 4°40'-8°00' Lintang Selatan dan 110° - 119°48'67" Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barru
- Sebelah Timur : Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Maros

Dari segi kependudukan, sesuai hasil proyeksi penduduk Kabupaten Pangkep pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk sebanyak 317.110 jiwa yang

tersebar di 13 Kecamatan, sedangkan ditahun 2012 sebesar 313.700 jiwa lebih tinggi 1,1% disbanding tahun 2011.

Kecamatan yang terluas dari Kabupaten Pangkep adalah Kecamatan Balocci dengan luas wilayah 143,48 km² dan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Mandalle dengan luas wilayah 40,16 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Luas Wilayah Kabupaten Pangkep Menurut Kecamatan tahun 2014.

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Liukang Tangaya	120	10,79
2	Liukang Kalmas	91,5	8,23
3	Liukang Tupabbiring	54,44	4,89
4	Liukang Tupabbiring Utara	85,56	7,69
5	Pangkajene	47,39	4,26
6	Minasatene	76,48	6,88
7	Balocci	143,48	12,90
8	Tondong tallasa	111,2	10,00
9	Bungoro	90,12	8,10
10	Labakkang	98,46	8,85
11	Ma'rang	75,22	6,76
12	Segeri	78,28	7,04
13	Mandalle	40,16	3,
Jumlah		1112,29	100,00

Sumber : BPS Sul-Sel, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka 2014

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

5.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pula dari besarnya PDRB yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di daerah tersebut. Dengan demikian, PDRB merupakan cerminan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

Sektor ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah. Semakin besar suatu sektor maka semakin besar pula kontribusi atau pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah.

Tabel 5.1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2013

Kabupaten/Kota	Rata-rata (%)
Makassar	9,49
Pare-pare	8,11
Palopo	8,20
Kepulauan selayar	8,62

Bantaeng	8,25
Pangkep	7,79
Total Rata-rata	8,41

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2014

Dari tabel 5.1 diatas diperoleh gambaran bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan selama periode 2003-2013 sesuai dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2000 berbeda-beda di setiap wilayah. Kota Makassar memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 9,49% dimana pada periode tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 9,88% dan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,91 %. Sedangkan untuk Kota Pare-pare mempunyai rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 8,11 % dimana pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,47 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,80 % begitu pula dengan Kota Palopo yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,20 % dimana pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,99 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 7,29 %. (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2014).

Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Kepulauan Selayar dimana memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,62 % dimana pada periode tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 9,47% dan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 7,89 %. Sedangkan untuk Kabupaten Bantaeng mempunyai rata-rata tingkat pertumbuhan

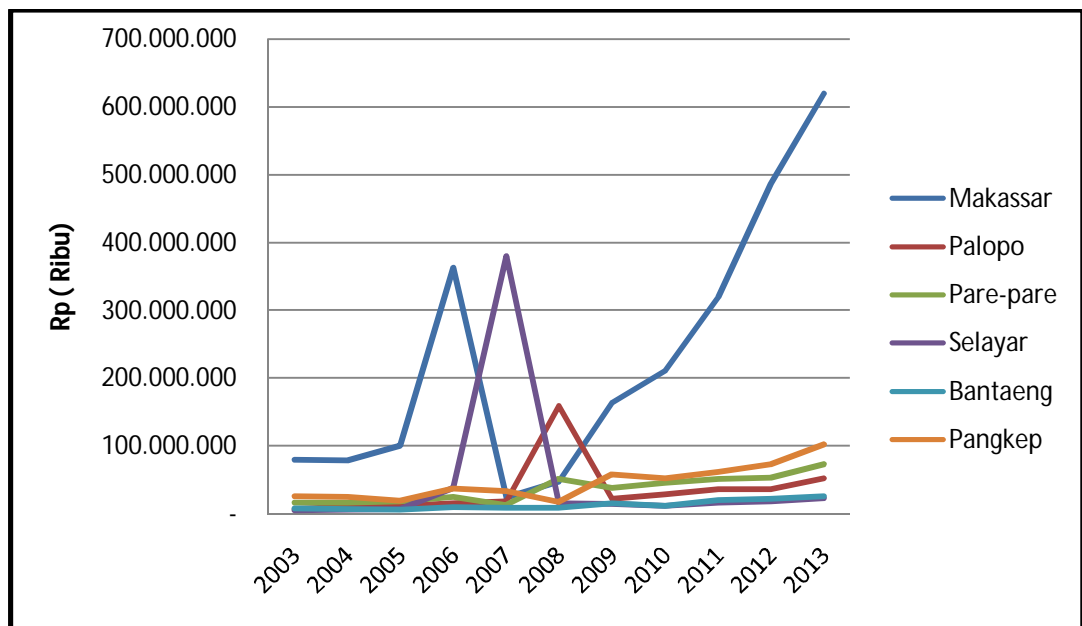
ekonomi sebesar 8,25 % dimana pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,82 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 7,61 % begitu pula dengan Kabupaten Pangkep yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,79 % dimana pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,61 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,91 %. (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2014)

5.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu sumber penerimaan daerah selain dana perimbangan adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk pembiayaan setiap kebutuhan daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar PAD yang diterima di Provinsi Sulawesi Selatan, berikut ini data tentang perkembangan penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2003-2013.

Grafik 5.1 Trend Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : BPS Sul-Sel, Kabupaten/Kota 2003-2013

Berdasarkan grafik diatas, penerimaan PAD setiap daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Semua kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan hampir memiliki trend yang sama. Dimana Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-pare dari periode 2003-2006 mengalami peningkatan, dimana peningkatan terbesar terjadi pada periode 2005-2006 yaitu untuk Kota Makassar Rp. 99,8 miliar menjadi Rp. 362,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 263%, Kota Palopo Rp. 11,5 miliar menjadi Rp. 15,4 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 34% dan untuk kota Pare-pare Rp. 17,4 miliar menjadi Rp. 23,8 Miliar atau naik sebesar 36,5%. Untuk kota Makassar sendiri jumlah penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 619,5 miliar atau meningkat 27,3 % dari tahun sebelumnya. Begitupun dengan kota Palopo penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 158,1 miliar atau meningkat 767% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk

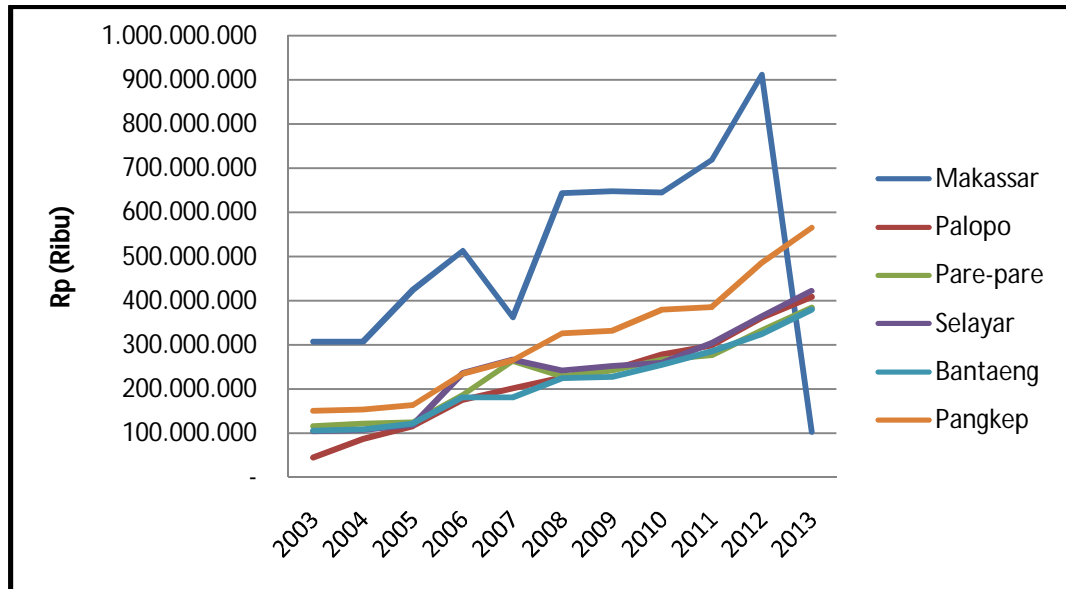
kota Pare-pare penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu Rp. 72,46 miliar atau meningkat sebesar 37,7 %.

Begitu pula untuk Kabupaten Selayar, pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada tahun sebelumnya Rp. 37,5 milyar menjadi Rp. 379,4 miliar atau meningkat sebesar 909,6 % dan ini merupakan pencapaian yang paling besar buat kabupaten selayar. Sedangkan untuk kabupaten Bantaeng penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu Rp. 22,3 miliar atau meningkat sebesar 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan untuk kabupaten Pangkep penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu Rp. 101,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 39,4 %.

5.1.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Selatan

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk mengetahui seberapa besar DAU yang diterima di Provinsi Sulawesi Selatan, berikut ini data tentang perkembangan penerimaan DAU di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2003-2013.

Grafik 5.2 Trend Penerimaan Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : BPS Sul-Sel, Kabupaten/Kota 2003-2013

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa penerimaan DAU di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dan memiliki trend yang hampir sama, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi semakin besar.

Kota Makassar merupakan wilayah yang Mendapatkan DAU yang paling besar, jika dilihat dari periode 2003-2013 selalu mengalami pluktuasi dari tahun ketahun. Penerimaan DAU terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu Rp. 911,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 26,8.% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu Rp. 103,3 miliar atau turun sebesar 88,7 %.

Untuk Kota Palopo jika dilihat dari periode 2003-2013 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun jumlah penerimaan terbanyak terjadi pada tahun

2013 yaitu Rp. 408,5 miliar atau meningkat sebesar 13 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kota Pare-pare selama periode 2003-2013 terjadi pluktuasi dimana pada tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 13,% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan yaitu Rp. 242 atau naik sebesar 5,5%, penerimaan terbesar untuk Kota Pare-pare terjadi pada tahun 2013 yaitu Rp. 384 miliar atau naik sebesar 15,5 %.

Begitupun untuk Kabupaten Selayar selama periode 2003-2013 terjadi pluktuasi dimana pada tahun 2008 terjadi penurunan penerimaan DAU sebesar Rp. 242,3 miliar atau turun sebesar 9 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan sebesar 4,1 % atau naik menjadi Rp. 252,3 miliar. Penerimaan paling besar terjadi pada tahun 2013 yaitu Rp. 421,2 miliar atau meningkat 15,2%.

Sedangkan untuk Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pangkep memiliki trend perkembangan yang sama yaitu selama periode 2003-2013 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, untuk Kabupaten Bantaeng sendiri penerimaan terbesarnya terjadi pada tahun 2013 yaitu Rp. 379,4 miliar atau meningkat sebesar 16,7% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Kabupaten Selayar juga mengalami penerimaan terbesar pada tahun 2013 yaitu Rp.565,9 miliar atau naik sebesar 16,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

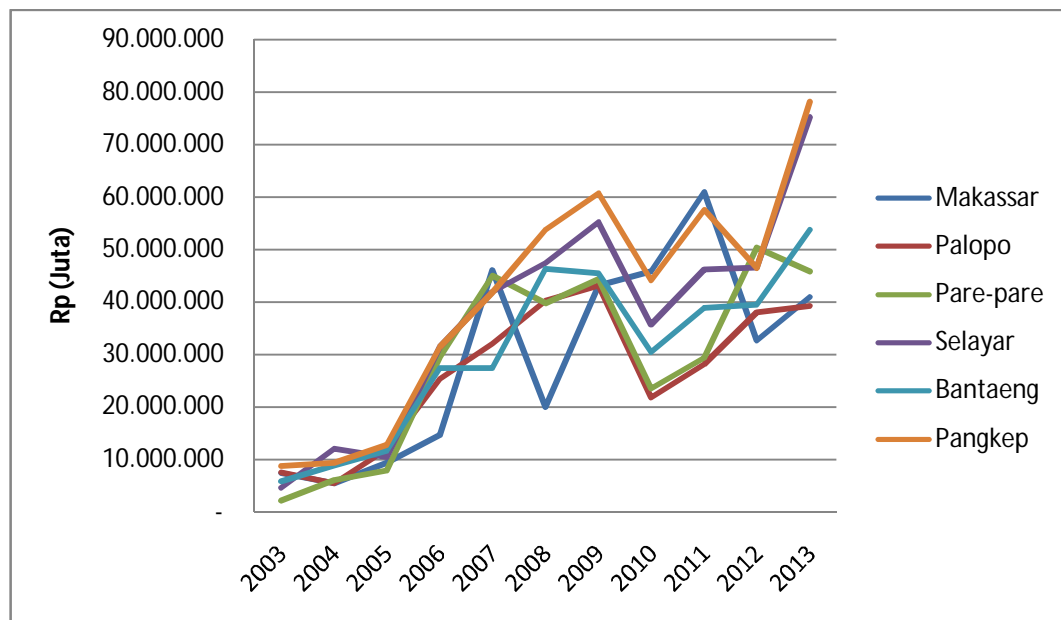
5.1.4 Perkembangan Dana Alokasi khusus di Provinsi Sulawesi Selatan

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu, pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN atau dengan kata lain besaran DAK tidak dapat dipastikan

setiap tahunnya, DAK diberikan kepada daerah apabila daerah tersebut menghadapi masalah-masalah khusus.

Untuk mengetahui seberapa besar DAK yang diterima di Provinsi Sulawesi Selatan, berikut ini data tentang perkembangan penerimaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2003-2013.

Grafik 5.3 Trend Penerimaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : BPS Sul-Sel, Kabupaten/Kota 2003-2013

Dari grafik diatas dapat dilihat trend penerimaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan dimana setiap Daerah memiliki trendnya masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai kebutuhan yang tidak sama.

Penerimaan DAK terkecil untuk Kota Makassar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 5,5 miliar atau mengalami penurunan sebesar 26,5% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun berikutnya kembali

meningkat sebesar 70% menjadi Rp. 9,3 miliar. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu Rp. 60,8 miliar atau naik sebesar 33,1% namun pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan sebesar 46,4%. Untuk Kota Palopo penerimaan DAK terkecil terjadi pada tahun 2004 dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 7,5 miliar menjadi Rp. 5,5 miliar atau turun sebesar 26,5%. Namun pada tahun 2005-2009 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pada tahun 2010 penerimaan DAK kembali mengalami penurunan yaitu Rp. 21,8 miliar atau turun sebesar 49,3% dan setelah periode tersebut penerimaan DAK kembali meningkat, terlihat pada tahun 2011-2013 terjadi peningkatan dari tahun ketahun yaitu masing-masing 28,7%, 34,9% dan 3,3%.

Sedangkan untuk Kota Pare-pare pada tahun 2003 mengalami penerimaan DAK terkecil yaitu Rp. 2,2 miliar namun pada periode 2003-2007 terus terjadi peningkatan dari tahun ketahun, ini dapat dilihat pada tahun 2007 penerimaan sebesar Rp. 44,9 miliar atau meningkat sebesar 52,7% namun pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 11,7% atau menjadi Rp. 39,7 miliar. Sedangkan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu Rp. 50,3 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 71,3%.

Kabupaten Selayar juga mengalami trend penerimaan DAK yang pluktuatif dimana penerimaan terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu Rp. 4,6 miliar sedangkan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu Rp. 75,1 miliar atau meningkat sebesar 61,4% dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 46,5 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Bantaeng penerimaan terkecilnya terjadi pada tahun 2003 yaitu Rp. 5,8 miliar namun pada tahun selanjutnya mengalami

peningkatan sebesar 52,5% menjadi Rp. 8,8 miliar. Trend positif ini terjadi sampai pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan sebesar 1,8% dan 32,9% akan tetapi pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan yaitu Rp. 38,8 miliar atau naik sebesar 27,7% begitupun pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 36% dibandingkan tahun sebelumnya dan ini merupakan penerimaan terbesar pada periode tersebut.

Sedangkan untuk kabupaten pangkep penerimaan terkecilnya terjadi pada tahun 2003 yaitu Rp. 8,7 miliar pada periode 2003-2009 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu Rp. 44,1 miliar atau turun sebesar 27,3%, pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan sebesar 30,5% namun pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan sebesar 19,3% dan pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 68,3% yaitu Rp. 78,2 miliar.

5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan *Dummy* Perbandingan Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan *Dummy* Perbandingan Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan model analisis regresi panel data dengan metode *Fixed effect* juga pengujian asumsi klasik multikolinearitas dan autokorelasi.

Tabel 5.2 Hasil Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013

Variabel Independen	T.H	B	t _{hitung}	Sig.	VIF
Pendapatan Asli Daerah	+	-0,011 ^{ns}	-0,049	0,961	2,966
Dana Alokasi Umum	+	0,913 [*]	1,893	0,063	3,103
Dana Alokasi Khusus	+	0,702 ^{**}	2,317	0,024	2,477
DmMakassar	+	2,429 ^{***}	3,542	0,001	2,669
DmPalopo	+	1,967 ^{***}	3,509	0,001	1,782
DmPare-pare	+	1,218 ^{**}	2,214	0,031	1,717
DmSelayar	+	0,577 ^{ns}	1,003	0,320	1,882
DmBantaeng	+	0,467 ^{ns}	0,773	0,443	2,073
Intersept					-23.172
Adjusted R ²					0,488
F _{hitung}					8.754
DW					1.315
B-Gtest					0,115
N					66

Sumber : hasil pengolahan data 2016

Keterangan :

- * : Signifikan pada tingkat kesalahan 10% (0,10) atau tingkat kepercayaan sebesar 90 %
- ** : Signifikan pada tingkat kesalahan 5% (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95%
- *** : Signifikan pada tingkat kesalahan 1% (0,01) atau tingkat kepercayaan sebesar 99%
- Ns : Tidak signifikan
- T.H : Tanda Harapan

Berdasarkan analisis yang telah digunakan pada BAB III, maka diperoleh persamaan berikut :

$$PE_{it} = -23,172 \text{ PAD}_{it}^{-0,011} \text{ DAU}_{it}^{0,913} \text{ DAK}_{it}^{0,712} \text{ DmMks}_i^{2,429} \text{ DmPlp}_i^{1,967} \text{ DmPre}_i^{1,218} \text{ DmSlyr}_i^{0,577} \text{ DmBtg}_i^{0,467} \mu^{lit} \dots\dots\dots(V.I)$$

Untuk meudahkan model perhitungan persamaan (V.1) maka persamaan tersebut diubah menjadi linear berganda dengan metode *semi-log* atau *Logaritma natural (Ln)* sebagai berikut

$$PE_{it} = \text{antiLn}(6,729) - 0,011 \text{ LnPAD}_{it} + 0,913 \text{ LnDAU}_{it} + 0,712 \text{ LnDAK}_{it} + \text{DmMks}_i^{2,429} + \text{DmPlp}_i^{1,967} + \text{DmPre}_i^{1,218} + \text{DmSlyr}_i^{0,577} + \text{DmBtgi}^{0,467} + \mu^{it} \dots\dots\dots (V.II)$$

Kemudian, untuk menguji apakah terjadi korelasi linear antara variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng pada model penelitian, maka digunakan salah satu pengujian asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas. Untuk bisa mengetahui apakah terjadi multikolinearitas pada suatu model penelitian dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, dimana jika nilai VIF menunjukkan angka yang <10 maka model tersebut dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, apabila nilai VIF > 10 maka model pada penelitian tersebut dinyatakan mengalami multikolinearitas atau terjadi korelasi antara variabel.

Dari hasil pengujian menggunakan SPSS diperoleh nilai $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng pada model penelitian yang dilakukan.

Selain uji multikolinearitas, uji asumsi klasik lain yaitu uji autokorelasi juga diperlukan pada penelitian untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya sehingga untuk melihat apakah terjadi autokorelasi pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng di model dapat menggunakan uji Durbin Watson, hanya saja uji ini menunjukkan nilai keragu-raguan. Oleh karena itu, pengujian autokorelasi ini bisa menggunakan uji lain yaitu dengan metode *Breusch-Godfrey (B-Gtest)*.

Uji *B-Gtest* digunakan untuk menguji adanya masalah autokorelasi dengan tingkat tinggi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya otokorelasi dapat dideteksi dengan cara menarik kesimpulan dengan membandingkan X^2 tabel dengan $df = (\alpha, p)$. Jika nilai X^2 hitung $> X^2$ tabel maka menunjukkan adanya masalah autokorelasi, jika nilai X^2 hitung $< X^2$ tabel menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi. Adapun pada model penelitian ini nilai X^2 hitung = 7,36 sedangkan X^2 tabel = 12,592 artinya X^2 hitung $< X^2$ tabel maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Selain pengujian dengan menggunakan uji asumsi klasik, digunakan pula pengujian lain yaitu uji statistik. Pada Uji statistik dengan menggunakan SPSS sebagai perhitungan diketahui bahwa nilai R adalah sebesar 0,742 atau sebesar 74,2% yang berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi , dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

Setelah melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui nilai R, kemudian dilihat pula berapa besar kontribusi variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat melalui nilai *Adjusted R²*. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,488 atau 48,8 persen yang berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng sebesar 0,488 atau dengan kata lain variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng mempengaruhi peningkatan atau penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 48,8%, dan sebesar 51,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model hal ini dikarenakan kompleksnya variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Uji statistik F atau biasa disebut uji simultan digunakan untuk menguji apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,754 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,172. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, sebaliknya apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng secara simultan tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dengan nilai $t_{hitung} = -0,049 < t_{tabel} = 2,001$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Alokasi Umum dengan nilai t_{hitung}

= 1,893 < t tabel = 2,001, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Alokasi Khusus dengan nilai t hitung = 2,317 > t tabel = 2,001, artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Dummy* Kota Makassar dengan nilai t hitung = 3,542 > t tabel = 2,001, artinya *dummy* kota makassar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, *Dummy* Kota Palopo dengan nilai t hitung = 3,509 > t tabel = 2,001, artinya *dummy* kota Palopo berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, *Dummy* Kota Pare-pare dengan nilai t hitung = 2,214 > t tabel = 2,001, artinya *dummy* kota Pare-pare berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, *Dummy* Kabupaten Selayar dengan nilai t hitung = 1,003 < t tabel = 2,001, artinya *dummy* Kabupaten selayar berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, serta *Dummy* Kabupaten Bantaeng dengan nilai t hitung = 0,773 < t tabel = 2,001, artinya *dummy* Kabupaten Bantaeng berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan,

Nilai intersep / konstanta sebesar -23,172 pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dana alokasi khusus, *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota pare-pare, *dummy* Kabupaten selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2003-2013 menunjukkan bahwa tanpa variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus,

dummy Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo, *dummy* Kota Pare-pare, *dummy* Kabupaten Selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng) maka nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan akan menurun sebesar 23,172 %.

5.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar -0,011 dengan signifikansi sebesar $0,961 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi. Secara empiris kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 67,2 miliar tidak berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,34%.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Gustiana (2014) bahwa variabel pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori yang ada dimana teori pertumbuhan baru mengatakan bahwa akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini sulit terwujud karena salah satu pos penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah pajak, dimana pajak dapat mengurangi konsumsi sehingga karena konsumsi berkurang maka penerimaan juga berkurang dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun.

5.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,913 dengan signifikansi sebesar $0,063 < \alpha = 0,10$, Hal ini menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi. Secara empiris kenaikan dana alokasi umum sebesar Rp. 289,4 miliar berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,34%.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Gustiana (2014) bahwa variabel Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permanasari (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga sejalan dengan teori yang ada dimana teori pertumbuhan baru mengatakan bahwa akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.

5.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan.

Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,702 dengan signifikansi sebesar $0,024 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya setiap kenaikan dana alokasi khusus sebesar Rp. 1 Juta maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,702%. Secara empiris setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 32,2 miliar maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,34%.

Hasil tidak ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permanasari (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini sejalan dengan teori yang ada dimana didalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, dana alokasi khusus dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi karena merupakan suatu bentuk investasi dari pemerintah yang nantinya dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga dengan adanya infrastuktur ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah.

5.2.4 Perbedaan Wilayah

Koefisien variabel perbedaan wilayah untuk *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota Palopo dan *dummy* Kota Pare-pare berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana tingkat signifikansi untuk *dummy* Kota Makassar sebesar $0,001 < \alpha = 0,01$, *dummy* Kota palopo sebesar $0,001 < \alpha = 0,01$ dan *dummy* Kota Pare-pare sebesar $0,031 < \alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *dummy* Kota Makassar, *dummy* Kota palopo dan *dummy* Kota Pare-pare berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, artinya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari variabel tersebut. Hal ini disebabkan karena kota lebih memerlukan suntikan dana yang lebih besar untuk membiayai infrastruktur di wilayahnya.

Sedangkan koefisien variabel perbedaan wilayah untuk *dummy* Kabupaten Selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tingkat signifikansi $>$

$\alpha = 0,05$, dimana tingkat signifikansu untuk *dummy* kabupaten Selayar sebesar 0,320 dan *dummy* Kabupaten Bantaeng sebesar 0,443. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *dummy* Kabupaten Selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, artinya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi tidak dapat dilihat melalui variabel tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dan analisis data penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, *Dummy* Kota Makassar, *Dummy* Kota Palopo dan *Dummy* Kota Pare-pare berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013, Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013, serta *Dummy* Kabupaten Selayar dan *dummy* Kabupaten Bantaeng berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013.

6.2 Saran

- a. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah agar memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber dana Ekstern dapat diminimalisir, serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan bijak, efektif dan efisien agar dapat menstimulus

peningkatan infrastruktur sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan variabel yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi misalnya memasukkan variabel dana bagi hasil, belanja pemerintah dan lain sebagainya serta menambah wilayah penelitian sehingga diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dana. 2012. Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.
- Arifintar, Mastar. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Kerja dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Solo Raya tahun 2004-2011. *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret.
- Badan Pusat Statistik. *Dalam Berbagai edisi*. Makassar
- Gustiana, Andi. 2014. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi empiris pada pemerintahan kabupaten soppeng periode 2005-2012). *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.
- Isa, Filza Mar'i. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.
- Jhingan. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta:Rajawali
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: reformasi, perencanaan, strategi, peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lucky, Dihan. 2011. Analisis Pengaruh Variabel Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Wilayah Karasidenan Malang tahun 2004-2009. *Skripsi*, Universitas Brawijaya Malang.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesoebroto, Guritmo. 1993. "Ekonomi Publik". Yogyakarta: BPFE
- Permana, Deva Yoga. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Permanasari, Windha Amiga. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahim, Abd. 2012. "Model Ekonometrika Perikanan Tangkap". Makassar:Badan Penerbit UNM.

- Sangdaji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Malang: Cv. Andi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Wahyuni. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Wardhana, Anggun Rangga. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap PDRB (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Universitas Andalas.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Regresi

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	7.3418	1.77681	66
PAD	17.2258	1.16214	66
DAU	19.3280	.57607	66
DAK	17.0385	.81891	66
DmMks	.1667	.37553	66
DmPlp	.1667	.37553	66
DmPre	.1667	.37553	66
DmSly	.1667	.37553	66
DmBtg	.1667	.37553	66

Lampiran (Lanjutan)

Correlations

[illegible]

Lampiran (Lanjutan)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DmBtg, DAK, DmMks, DmSly, DmPlp, DmPre, PAD, DAU ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.742 ^a	.551	.488	1.27101	1.315

a. Predictors: (Constant), DmBtg, DAK, DmMks, DmSly, DmPlp, DmPre, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran (Lanjutan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.128	8	14.141	8.754	.000 ^b
	Residual	92.081	57	1.615		
	Total	205.209	65			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), DmBtg, DAK, DmMks, DmSly, DmPlp, DmPre, PAD, DAU

Lampiran (Lanjutan)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-23.172	6.506		-3.561	.001		
PAD	-.011	.234	-.008	-.049	.961	.337	2.966
DAU	.913	.482	.296	1.893	.063	.322	3.103
DAK	.702	.303	.324	2.317	.024	.404	2.477
1 DmMks	2.429	.686	.513	3.542	.001	.375	2.669
DmPlp	1.967	.560	.416	3.509	.001	.561	1.782
DmPre	1.218	.550	.257	2.214	.031	.583	1.717
DmSly	.577	.576	.122	1.003	.320	.531	1.882
DmBtg	.467	.604	.099	.773	.443	.482	2.073

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran (Lanjutan)

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions								
				(Constant)	PAD	DAU	DAK	DmMks	DmPlp	DmPre	DmSly	DmBtg
1	1	4.856	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	1.002	2.202	.00	.00	.00	.00	.20	.00	.00	.05	.09
	3	1.000	2.204	.00	.00	.00	.00	.04	.18	.11	.08	.04
	4	1.000	2.204	.00	.00	.00	.00	.00	.03	.02	.21	.17
	5	1.000	2.204	.00	.00	.00	.00	.01	.17	.25	.02	.02
	6	.140	5.885	.00	.00	.00	.00	.39	.54	.56	.51	.45
	7	.001	63.485	.20	.57	.02	.04	.06	.03	.02	.08	.15
	8	.001	68.822	.06	.43	.00	.54	.17	.00	.02	.03	.04
	9	.000	159.369	.75	.00	.98	.42	.14	.05	.01	.03	.03

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.8613	10.2286	7.3418	1.31925	66
Residual	-3.06182	4.38457	.00000	1.19022	66
Std. Predicted Value	-1.880	2.188	.000	1.000	66
Std. Residual	-2.409	3.450	.000	.936	66

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran 2 Uji B-Gtest

Model Summary^{c,d}

Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.339 ^a	.115	.086	1.10602888	1.834

n = 66

P = 2

$$\begin{aligned}X^2_{\text{hitung}} &= (n-p) R^2 \\&= (66-2) 0,115 \\&= 64 \times 0,115 \\&= 7,36\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}X^2_{\text{tabel}} &= (\alpha; n-2) \\&= (0,05; 64) \\&= 83,68\end{aligned}$$

Karena nilai $X^2_{\text{hitung}} (7,36) < X^2_{\text{tabel}} (83,68)$, maka model persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi

Lampiran 3 Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah	Tahun	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK
MAKASSAR	2003	8.60	78,684,690	308,140,000	7,484,350
MAKASSAR	2004	10.24	78,538,661	308,158,000	5,500,000
MAKASSAR	2005	7.16	99,841,780	425,112,000	9,350,303
MAKASSAR	2006	8.09	362,267,832	513,004,000	14,680,000
MAKASSAR	2007	8.11	23,376,100	362,625,000	46,041,000
MAKASSAR	2008	10.52	46,752,052	643,328,392	19,993,000
MAKASSAR	2009	9.20	163,291,027	647,299,704	43,151,000
MAKASSAR	2010	9.83	210,136,331	644,266,427	45,753,700
MAKASSAR	2011	9.65	318,732,000	718,800,000	60,898,000
MAKASSAR	2012	9.88	486,787,044	911,122,797	32,644,320
MAKASSAR	2013	8.91	619,593,144	103,358,390	40,886,880
PALOPO	2003	10.21	6,735,641	45,590,000	7,525,887
PALOPO	2004	7.37	10,325,408	87,825,000	5,500,000
PALOPO	2005	7.72	11,564,739	116,342,000	11,994,414
PALOPO	2006	6.32	15,496,226	176,265,000	25,330,000
PALOPO	2007	6.53	18,222,472	202,459,000	32,080,000
PALOPO	2008	7.44	158,131,364	226,220,617	40,268,000
PALOPO	2009	7.86	21,473,395	244,343,643	43,135,000
PALOPO	2010	7.29	28,219,020	278,578,487	21,880,500
PALOPO	2011	8.16	35,703,421	297,920,487	28,167,700

PALOPO	2012	8.68	36,214,002	361,383,685	38,000,330
PALOPO	2013	8.99	51,663,731	408,527,791	39,243,130
PARE-PARE	2003	5.00	15,205,651	116,320,000	2,215,757
PARE-PARE	2004	6.23	15,465,261	121,837,000	6,060,000
PARE-PARE	2005	5.98	17,448,000	124,411,000	7,900,000
PARE-PARE	2006	6.96	23,820,080	187,707,000	29,460,000
PARE-PARE	2007	6.98	11,655,900	264,008,000	44,979,000
PARE-PARE	2008	7.56	50,669,451	229,446,628	39,708,000
PARE-PARE	2009	8.09	37,378,316	242,064,003	44,431,000
PARE-PARE	2010	8.25	45,089,915	266,298,518	23,514,400
PARE-PARE	2011	7.80	50,922,103	276,395,953	29,404,700
PARE-PARE	2012	7.92	52,629,181	332,564,413	50,362,700
PARE-PARE	2013	8.47	72,462,126	384,096,063	45,798,230
SELAYAR	2003	4.18	4,119,793	105,300,000	4,608,359
SELAYAR	2004	4.50	5,246,968	108,368,000	12,070,000
SELAYAR	2005	3.90	6,409,499	119,057,000	10,450,000
SELAYAR	2006	5.57	37,579,570	236,037,000	31,465,000
SELAYAR	2007	6.45	379,408,550	266,302,000	41,941,000
SELAYAR	2008	7.27	14,516,849	242,376,729	47,395,000
SELAYAR	2009	7.89	13,380,981	252,361,321	55,219,000
SELAYAR	2010	8.01	10,758,865	259,174,593	35,670,600
SELAYAR	2011	8.52	15,195,732	304,170,107	46,184,300
SELAYAR	2012	9.18	17,229,721	365,634,515	46,580,000
SELAYAR	2013	9.47	22,391,990	421,256,593	75,158,860
BANTAENG	2003	4.89	7,271,770	106,330,000	5,800,000
BANTAENG	2004	4.22	6,293,804	109,648,000	8,844,468

BANTAENG	2005	4.35	5,709,000	122,487,000	11,630,000
BANTAENG	2006	5.10	9,093,775	181,858,000	27,415,000
BANTAENG	2007	5.14	8,303,694	181,858,000	27,415,000
BANTAENG	2008	6.73	8,829,437	224,668,231	46,248,000
BANTAENG	2009	7.61	15,461,918	227,500,507	45,415,000
BANTAENG	2010	7.90	11,084,858	255,126,018	30,458,900
BANTAENG	2011	8.43	19,468,168	285,057,263	38,894,100
BANTAENG	2012	8.49	21,990,844	325,057,232	39,504,550
BANTAENG	2013	8.82	25,420,000	379,463,000	53,714,000
PANGKEP	2003	1.98	25,075,196	151,260,000	8,723,899
PANGKEP	2004	6.19	24,886,788	154,392,000	9,308,957
PANGKEP	2005	5.61	18,538,512	164,764,000	12,800,000
PANGKEP	2006	5.92	36,477,705	236,037,000	31,465,000
PANGKEP	2007	6.12	33,252,484	266,302,000	41,866,000
PANGKEP	2008	7.16	16,987,653	326,055,514	53,765,000
PANGKEP	2009	5.91	57,723,346	332,583,364	60,698,000
PANGKEP	2010	6.34	52,038,628	379,971,025	44,142,800
PANGKEP	2011	9.17	60,930,305	385,552,312	57,593,800
PANGKEP	2012	9.61	73,048,165	485,962,003	46,460,490
PANGKEP	2013	7.93	101,835,960	565,929,217	78,201,060
Total		485	4,440,456,593	19,103,718,542	2,130,447,444
Rata-rata		7.34	67,279,645.34	289,450,280.94	32,279,506.73

Lampiran 4 Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Makassar

Tahun	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK
2003	8.60	78,684,690	308,140,000	7,484,350
2004	10.24	78,538,661	308,158,000	5,500,000
2005	7.16	99,841,780	425,112,000	9,350,303
2006	8.09	362,267,832	513,004,000	14,680,000
2007	8.11	23,376,100	362,625,000	46,041,000
2008	10.52	46,752,052	643,328,392	19,993,000
2009	9.20	163,291,027	647,299,704	43,151,000
2010	9.83	210,136,331	644,266,427	45,753,700
2011	9.65	318,732,000	718,800,000	60,898,000
2012	9.88	486,787,044	911,122,797	32,644,320
2013	8.91	619,593,144	103,358,390	40,886,880
Total	100.19	2,488,000,661	5,585,214,710	326,382,553
Rata-rata	9.11	226,181,878	507,746,792	29,671,141

Lampiran 5 Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Palopo

Tahun	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK
2003	10.21	6,735,641	45,590,000	7,525,887
2004	7.37	10,325,408	87,825,000	5,500,000
2005	7.72	11,564,739	116,342,000	11,994,414
2006	6.32	15,496,226	176,265,000	25,330,000
2007	6.53	18,222,472	202,459,000	32,080,000
2008	7.44	158,131,364	226,220,617	40,268,000
2009	7.86	21,473,395	244,343,643	43,135,000
2010	7.29	28,219,020	278,578,487	21,880,500
2011	8.16	35,703,421	297,920,487	28,167,700
2012	8.68	36,214,002	361,383,685	38,000,330
2013	8.99	51,663,731	408,527,791	39,243,130
Total	86.57	393,749,419	2,445,455,710	293,124,961
Rata-rata	7.87	35,795,402	222,314,155	26,647,724

Lampiran 6 Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Pare-pare

Tahun	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK
2003	5.00	15,205,651	116,320,000	2,215,757
2004	6.23	15,465,261	121,837,000	6,060,000
2005	5.98	17,448,000	124,411,000	7,900,000
2006	6.96	23,820,080	187,707,000	29,460,000
2007	6.98	11,655,900	264,008,000	44,979,000
2008	7.56	50,669,451	229,446,628	39,708,000
2009	8.09	37,378,316	242,064,003	44,431,000
2010	8.25	45,089,915	266,298,518	23,514,400
2011	7.80	50,922,103	276,395,953	29,404,700
2012	7.92	52,629,181	332,564,413	50,362,700
2013	8.47	72,462,126	384,096,063	45,798,230
Total	79.24	392,745,984	2,545,148,578	323,833,787
Rata-rata	7.20	35,704,180	231,377,143	29,439,435

Lampiran 7 Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Selayar

Tahun	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK
2003	4.18	4,119,793	105,300,000	4,608,359
2004	4.50	5,246,968	108,368,000	12,070,000
2005	3.90	6,409,499	119,057,000	10,450,000
2006	5.57	37,579,570	236,037,000	31,465,000
2007	6.45	379,408,550	266,302,000	41,941,000
2008	7.27	14,516,849	242,376,729	47,395,000
2009	7.89	13,380,981	252,361,321	55,219,000
2010	8.01	10,758,865	259,174,593	35,670,600
2011	8.52	15,195,732	304,170,107	46,184,300
2012	9.18	17,229,721	365,634,515	46,580,000
2013	9.47	22,391,990	421,256,593	75,158,860
Total	74.94	526,238,518	2,680,037,858	406,742,119
Rata-rata	6.81	47,839,865	243,639,805	36,976,556

Lampiran 8 Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bantaeng

Tahun	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK
2003	4.89	7,271,770	106,330,000	5,800,000
2004	4.22	6,293,804	109,648,000	8,844,468
2005	4.35	5,709,000	122,487,000	11,630,000
2006	5.10	9,093,775	181,858,000	27,415,000
2007	5.14	8,303,694	181,858,000	27,415,000
2008	6.73	8,829,437	224,668,231	46,248,000
2009	7.61	15,461,918	227,500,507	45,415,000
2010	7.90	11,084,858	255,126,018	30,458,900
2011	8.43	19,468,168	285,057,263	38,894,100
2012	8.49	21,990,844	325,057,232	39,504,550
2013	8.82	25,420,000	379,463,000	53,714,000
Total	71.68	138,927,268	2,399,053,251	335,339,018
Rata-rata	6.52	12,629,752	218,095,750	30,485,365

Lampiran 9 Tabel Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pangkep

Tahun	PERTUMBUHAN EKONOMI	PAD	DAU	DAK
2003	1.98	25,075,196	151,260,000	8,723,899
2004	6.19	24,886,788	154,392,000	9,308,957
2005	5.61	18,538,512	164,764,000	12,800,000
2006	5.92	36,477,705	236,037,000	31,465,000
2007	6.12	33,252,484	266,302,000	41,866,000
2008	7.16	16,987,653	326,055,514	53,765,000
2009	5.91	57,723,346	332,583,364	60,698,000
2010	6.34	52,038,628	379,971,025	44,142,800
2011	9.17	60,930,305	385,552,312	57,593,800
2012	9.61	73,048,165	485,962,003	46,460,490
2013	7.93	101,835,960	565,929,217	78,201,060
Total	71.94	500,794,742	3,448,808,435	445,025,006
Rata-rata	6.54	45,526,795	313,528,040	40,456,819



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Raya Pendidikan Makassar
Telepon. 0411 - 889464 – 881244 Fax. (0411) 889464
Laman: www.unm.ac.id/fakultas-ekonomi.html

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 4204/UN36.22/KP/2016
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA IRMAL SUANDI NIM 1296141006 PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN

- Membaca :** Surat Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Nomor : 4201/UN/UN.36.22/KP/2016 tanggal 13 Juli 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 025/O/2002;
 6. Keputusan Rektor UNM Nomor 1073/PP/2010
 7. Keputusan Kemendikbud Nomor 48 Tahun 2011.
 8. Keputusan Rektor UNM Nomor 05/UN36/KP/2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Dosen yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Tim Penguji Skripsi Mahasiswa:
- | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap | : Irmal Suandi |
| NIM | : 1296141006 |
| Program Studi | : Ekonomi Pembangunan |
| Judul Skripsi | : " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. |

Dengan Susunan Tim Penguji Ujian Akhir Skripsi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Muhammad Azis, M.Si. |
| 2. Wakil Ketua | : Dr. Anwar Ramli, S.E., M.Si. |
| 3. Sekretaris | : M.Imam Ma'ruf, S.P., M.Sc. |
| 4. Anggota | |
| 4.1 Pembimbing I | : Dr. Abd Rahim, S.P., M.Si. |
| 4.2 Pembimbing II | : Andi Samsir, S.Pd., M.Si. |
| Penguji I | : Dr. Basri Bado, S.Pd., M.Si. |
| 4.3 Penguji II | : Diah Retno Dwi Hastuti, S.P., M.Si. |

Tim Penguji Ujian Akhir Skripsi bertugas memeriksa dan menilai skripsi mahasiswa tersebut sesuai dengan peraturan dan pedoman penilaian.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 14 Juli 2016
a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si.
NIP 1962011 198702 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Raya Pendidikan Makassar
Telepon. 0411 - 889464 – 881244 Fax. (0411) 889464
Laman: www.unm.ac.id/fakultas-ekonomi.html

Makassar, 14 Juli 2016

Nomor : 4206 /UN36.22/KP/2016
Lampiran : 1 Skripsi
Hal : Undangan Ujian Akhir Skripsi

Kepada

Yth : Dr. H. Muhammad Azis, M.Si. (Ketua)
Dr. Anwar Ramli, S.E., M.Si. (Wakil Ketua)
M. Imam Ma'ruf, S.P., M.Sc. (Sekertaris)
Dr. Abd Rahim, S.P., M.Si. (Pembimbing I)
Andi Samsir, S.Pd., M.Si. (Pembimbing II)
Dr. Basri Bado, S.Pd., M.Si. (Penguji I)
Diah Retno Dwi Hastuti, S.P., M.Si. (Penguji II)

Di Makassar

Dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Akhir Skripsi Mahasiswa:

Nama Lengkap : Irmal Suandi
NIM : 1296141006
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/ 15 Juli 2016
Waktu : 13.00 – 16.00 WITA
Tempat : Ruang Laboratorium Permodelan Ekonom

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si.
NIP 1962011 198702 1 001

RIWAYAT HIDUP



Irmal Suandi lahir pada tanggal 28 Agustus 1995 di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Abd. Rajab dan Deriwati.

Pada tahun 2000 penulis memulai pendidikan tingkat dasar di SDN. No. 23 Patontongan Kecamatan Binamu dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Binamu Kab. Jeneponto dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Jeneponto dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar Program Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN dan menyelesaikan program studi pada tahun 2016.